

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemda adalah pelayanan masyarakat, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih Pemda memperoleh tuntutan dari masyarakat untuk dapat mengaplikasikan transparansi dan akuntabilitas pada saat mengelola keuangannya. penyajian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) meliputi CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan), Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Realisasi Anggaran di mana penyusunannya menggunakan pedoman SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Pada penyusunan LKPD terdapat 2 kelompok yaitu, *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). *Mandatory disclosure* adalah informasi yang harus diungkapkan sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan *voluntary disclosure* adalah informasi yang tidak harus diungkapkan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pengungkapannya didasarkan atas adanya relevansi dengan kebutuhan para penggunanya. Di Indonesia, tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP masih terbilang rendah, rata-rata sebesar 35,45% (Liestiani 2008), 22% (Lesmana 2010), dan 51,56% (Suhardjanto et al., 2010). Hal tersebut memperlihatkan jika pemda belum sepenuhnya melakukan pengungkapan wajib dalam LKPD sehingga peneliti tertarik untuk penelitian tentang berbagai hal yang memengaruhi pengungkapan wajib LKPD.

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, terlihat menurun jika faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD antara lain Ukuran (*size*) pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemda, diferensiasi fungsional, rasio kemandirian

keuangan daerah, spesialisasi pekerjaan, *intergovernmental*, opini, dan kekayaan pemerintah daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah memperlihatkan seberapa besar ukuran pemerintahan daerah (Suhardjanto 2010). Ukuran pemda adalah besar/kecilnya kepemilikan sumber daya suatu daerah terlihat dari kepemilikan total aset suatu daerah. Besarnya kepemilikan sumber daya suatu daerah menjadikan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas pengelolaan keuangan daerah melalui lebih banyaknya informasi diungkap pada LKPD.

Ukuran Legislatif (DPRD) adalah suatu lembaga yang mempunyai peran dan posisi strategis yang berhubungan erat dengan pengawasan keuangan pada suatu daerah (Winarna dan Murni, 2007). Legislatif berperan sebagai pembuat kebijakan publik, khususnya mengenai penyusunan anggaran pada suatu daerah (Abdullah dan Asmara, 2006). DPRD memiliki tugas sebagai perwakilan dari masyarakat dengan fungsi pengawasan untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan supaya dapat menyesuaikan dengan aspirasi publik, memantau penyelenggaraan pemerintahan, dan penyampaian laporan informasi keuangan pemda untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi LKPD.

Umur administratif pemda adalah seberapa lama pemda telah berdiri untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk mendapatkan nilai dari Umur administratif pemda terlihat dari pembentukan pemda sesuai dengan perundang-undangan. Penelitian Lesmana (2010) menyebutkan jika pemda yang sudah lama terbentuk, maka akan lebih memiliki pengalaman, yang menjadikannya unggul dalam hal penyelenggaraan pemerintahan terutama pada sistem pelaporan keuangan, proses pencatatan dan administrasi keuangan.

Diferensiasi fungsional merupakan seberapa jauh organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa departemen fungsional. Diferensiasi fungsional dapat berperan sebagai pemberi fasilitas untuk saling bertukar inovasi, informasi, dan ide (Damanpour dalam Patrick,

2007). Banyaknya departemen fungsional Pemda, maka pengungkapan di dalam LKPD atas belanja bantuan sosial akan semakin besar.

Rasio kemandirian keuangan terlihat dari nilai PAD dibagi transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2007), PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang didapat dari sumber-sumber ekonomi suatu daerah. sumber-sumber pajak yaitu hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. tingginya partisipasi masyarakat akan meninggalkan transparansi keuangan oleh pemerintah daerah.

Spesialisasi pekerjaan adalah suatu tingkatan dimana dilakukan pembagian tugas pada masing-masing kelompok kerja tersendiri. Spesialisasi pekerjaan Dapat dinilai melalui tingkat pendidikan formal masing-masing pegawai. Patrick (2007) Mengemukakan jika *GASB (Governmental Accounting Standards Board)* 34 lebih diinginkan untuk diadopsi oleh para perangkat Pemda dengan spesialisasi pekerjaan pada bidang penyusunan laporan keuangan dan akuntansi daerah.

Menurut Patrick (2007), *Intergovernmental revenue* adalah suatu Jenis penerimaan yang didapat oleh Pemda dan berasal dari transfer Pusat di daerah untuk mendanai berbagai aktivitas operasional Pemda. Variabel ini lebih sering dikenal dengan sebutan dana perimbangan. *Intergovernmental revenue* Dapat dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan operasional pemerintah agar dapat melayani publik dengan lebih baik. bila dana perimbangan yang diterima oleh Pemda itu lebih besar maka muncul Harapan bahwa Pemda akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan lebih bersifat transparan untuk mengungkapkan informasi yang ada.

Opini adalah hasil dari audit pada *financial report* Pemda Yang berbentuk pendapat wajar atau tidaknya informasi finansial yang ada pada financial report tersebut (BPK, 2009).

Opini audit laporan keuangan Dapat memperlihatkan wajar atau tidaknya akuntabilitas financial report yang dapat bermanfaat untuk kurangi tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemda. pengungkapan Pemda yang semakin baik akan mengurangi kerugian yang dialami oleh benda tersebut.

Kekayaan Pemda memperlihatkan tingkat kesejahteraan/ kemakmuran suatu daerah (Sinaga, 2011). Kekayaan Pemda Dapat dinilai melalui besaran PAD. Peningkatan yang terjadi pada periode mempunyai peran dalam meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pemerintahan melalui pembayaran retribusi daerah dan pajak oleh masyarakat gaya tersebut yang menjadikan adanya motivasi untuk mengungkapkan secara detail informasi *financial report* supaya lebih akuntabel dan transparan.

Penelitian terdahulu mengenai berbagai Faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD memiliki hasil yang tidak konsisten. Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) serta Sumarjo (2010) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh ukuran Pemda secara positif. Sedangkan penelitian Waliyyani dan Amir (2015) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi secara negatif signifikan oleh ukuran Pemuda.

*Intergovernmental Revenue* pada penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) dan Suhardjanto et.al (2010) dalam Sumarjo, (2010) disebutkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh *Intergovernmental Revenue* secara positif. Sedangkan penelitian Waliyyani dan Amir (2015) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh *Intergovernmental Revenue* secara negatif.

Opini Audit pada penelitian Putri, (2015), Suchyo (2013) dan Heriningsih (2012) memperlihatkan jika pengungkapan LKPD dipengaruhi oleh opini audit BPK secara positif.

Sedangkan pada penelitian Heriningsih, Sucahyo (2013) memperlihatkan jika pengungkapan LKPD dipengaruhi oleh opini audit BPK secara negatif.

Ukuran Legislatif pada penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh ukuran legislatif secara positif. Sedangkan pada penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib dipengaruhi oleh jumlah anggota DPRD secara positif

Umur administratif pemda pada penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh umur administrasi Pemda secara positif. Sedangkan pada penelitian Lasward et al. (2005), Ingram (1986), dan Liestiani (2008) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh umur administrasi Pemda secara positif.

Diferensiasi Fungsional pada penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh diferensiasi fungsional Pemda secara positif. Sedangkan pada penelitian Patrick (2007) memperlihatkan jika penerapan inovasi administrasi GASB 34 dipengaruhi oleh diferensiasi fungsional secara positif.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara positif. Sedangkan pada penelitian Lesmana (2010) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara positif.

Spesialisasi Pekerjaan pada penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh Spesialisasi Pekerjaan secara positif.

Sedangkan pada penelitian Suhardjanto et al. (2010) memperlihatkan jika kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib dipengaruhi oleh Spesialisasi Pekerjaan secara positif.

Kekayaan Pemerintah Daerah pada penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) memperlihatkan jika tingkat pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh Kekayaan Pemerintah Daerah secara positif. Sedangkan pada penelitian Sudarsana (2013) serta Mustikarini dan Fitrisari (2012) memperlihatkan jika kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat kekayaan daerah secara positif.

Sejumlah hasil penelitian yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang berbagai Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Acuan yang di pergunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012). Namun memiliki beberapa perbedaan antara lain:

1. Adanya penambahan variabel opini audit pada penelitian ini. Peneliti menduga bahwa Opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD Sebab bila opini audit yang dihasilkan oleh BPK semakin baik maka publik akan memiliki kepercayaan lebih baik atas pengungkapan wajib LKPD yang dilakukan oleh pemerintah. Alasan penambahan variabel ini yaitu Adanya saran dari penelitian sebelumnya untuk menambahkan variabel tersebut. dan alasan lain yaitu supaya pembaca dapat melihat seberapa besar opini yang diterima oleh setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah dan diharapkan bagi pemerintah daerah yang di berikan opini WTP ( wajar tanpa pengecualian) untuk dapat memperbaiki laporan keuangannya agar lebih berkualitas pada periode berikutnya.
2. Adanya perbedaan sampel yang digunakan. Pada penelitian ini mempergunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2014-2016 sedangkan pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan yaitu benda yang ada di

seluruh provinsi Indonesia selama periode 2008-2009. Alasan peneliti menggunakan sampel tersebut adalah hasil penelitian yang didapat lebih bermanfaat dan lebih memiliki keakuratan hasil bagi para *stakeholder* yang bersinggungan langsung dengan Pemda kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *research gap* dan perlunya perluasan penelitian yang didukung oleh teori yang mendasari, maka terdapat 8 rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Size* Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
2. Apakah pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
3. Apakah pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
4. Apakah pengaruh Diferensiasi Fungsional terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
5. Apakah pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
6. Apakah pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
7. Bagaimana pengaruh *Intergovernmental* terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
8. Bagaimana pengaruh Opini terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?
9. Bagaimana pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut :

1. *Size* Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
2. Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
3. Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
4. Diferensiasi Fungsional terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
6. Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
7. *Intergovernmental* terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
8. Opini terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.
9. Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Wajib Pengungkapan LKPD.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi BPK RI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap opini BPK RI.
2. bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengupayakan peningkatan kualitas LKPD agar lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan saran kepada pemerintah daerah